

# **PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PELAWAN BERBASIS AGILE GOVERNANCE DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023**

**Oleh: Muhammad Zaki**

**Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Pelawan beach tourism is one of the favorite tourist attractions in Karimun Regency which has the uniqueness of a stretch of white sand and a charming blue sea so that Pelawan beach is very good to be developed. However, there is a phenomenon, namely the decreasing number of tourist visits, so that organizational governance is needed by the government in developing tourism potential and providing benefits quickly, namely the development of tourist attractions based on agile governance. This study aims to determine and describe the development of Pelawan beach tourism objects based on agile governance in Karimun Regency in 2023. This study uses a qualitative approach & descriptive research type. The data used are primary data obtained from research informants and supported by secondary data obtained from official government documents and scientific publications. Data collection techniques in this study are by interview and documentation. The results of the study indicate that the development of Pelawan beach tourism objects based on agile governance has not been fully maximized because there are indicators of agile governance that have not been met, such as the lack of new innovations and an adaptive approach to changes that occur by the Karimun Regency Tourism Office. In addition, several obstacles that occur such as budget limitations and low tourism awareness by the local community are challenges for the Karimun Regency Tourism Office in developing Pelawan beach tourism objects based on agile governance in Karimun Regency in 2023.*

***Keywords: Agile Governance, Tourism Objects, Tourism Object Development***

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman sekarang, pariwisata telah menjadi salah satu sektor potensial pada aspek ekonomi bagi masyarakat dan aspek finansial

terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan pariwisata berkontribusi dalam menunjang pembangunan suatu wilayah sekaligus menciptakan peluang kesempatan kerja bagi

masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di Indonesia. Pembangunan pariwisata termasuk ke dalam sektor unggulan karena menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Winata et al., 2023).

Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 4, dijelaskan bahwa tujuan-tujuan dari kepariwisataan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengurangi kemiskinan serta menanamkan rasa cinta tanah air. Tujuan-tujuan kepariwisataan tersebut mendorong pengembangan destinasi wisata yang profesional untuk mendukung potensi wisata yang ada (Andrian, 2022). Dalam hal ini, pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009.

Lalu pada Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pariwisata termasuk salah satu urusan pemerintahan pilihan, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pusat ke daerah dan diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah diberi kewenangan lebih luas untuk

mengelola pariwisata di daerahnya dan bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang pembangunan di daerah (Suarto, 2017).

Pengembangan objek wisata suatu daerah amat penting karena berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi di daerah tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan & retribusi daerah, penyediaan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, dalam pengembangan objek wisata dibutuhkan suatu tata kelola organisasi publik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wisata yang ada untuk memberikan kebermanfaatan secara cepat dan tangkas, yakni pengembangan objek wisata berbasis *agile governance*.

*Agile governance* merupakan kemampuan instansi pemerintah dalam menanggapi atau merespons secara sigap dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pada konsep *agile governance* pemerintah dituntut untuk gesit dalam menghadapi perkembangan yang ada sehingga pemerintah mampu menyesuaikan dan mengambil suatu tindakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perubahan atau situasi yang terjadi di daerahnya. Pelaksanaan prinsip *agile governance* diharapkan dapat menjadikan tata kelola pemerintah daerah yang lebih cepat tanggap dalam melakukan pengembangan objek wisata di daerahnya.

Salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang menjadi tujuan kunjungan para wisatawan adalah

Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya tarik pariwisata yang indah dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura sehingga Kabupaten Karimun menjadi lokasi strategis sebagai tempat kunjungan oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Letak geografis Kabupaten Karimun yang begitu strategis membuat perkembangan Kabupaten Karimun begitu pesat dan mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian (Zulaika, 2022). Tentunya ini merupakan suatu peluang bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal (Alvira Syahwa et al., 2022).

Kabupaten Karimun mempunyai beberapa objek wisata bahari yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan, satu diantaranya adalah pantai Pelawan. Pantai Pelawan yang terletak di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat ini merupakan objek wisata terbaik yang berada di Karimun, karena pantai ini merupakan objek wisata unggulan dibandingkan dengan objek wisata lainnya serta menjadi prioritas utama kunjungan bagi wisatawan (Iskandar, 2021). Pantai Pelawan termasuk Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) untuk pengembangan wisata bahari dan wisata alam yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Karimun Nomor 131 tahun 2017 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Pantai Pelawan memiliki beberapa keunikan yakni hamparan pasir putih bersih, pepohonan lebat yang tumbuh di sepanjang pantai, serta keindahan

laut birunya. Keunikan yang dimiliki pantai Pelawan sangat bagus untuk dilakukan pengembangan agar meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan meningkatkan kunjungan para wisatawan.

### Gambar 1. Pantai Pelawan



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun

Saat ini, pengembangan objek wisata pantai Pelawan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, yakni di Bidang Destinasi Pariwisata. Dalam melakukan pengembangan objek wisata pantai Pelawan, Dinas Pariwisata telah membangun berbagai prasarana seperti gazebo, panggung kesenian, kamar mandi/WC hingga musholla. Selain itu, di pantai Pelawan juga terdapat beberapa wahana seperti *banana boat*, perahu karet serta spot untuk *swafoto* untuk menarik kunjungan wisatawan.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa fenomena yang terjadi yaitu, pertama minimnya pusat atau media informasi mengenai objek wisata pantai Pelawan sehingga keberadaan pantai Pelawan hanya dikenal luas oleh masyarakat lokal dan kurang terekspos di kalangan wisatawan nusantara dan mancanegara (Iskandar, 2021). Fenomena kedua yang terjadi pada pengembangan objek

wisata pantai Pelawan yakni menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di pantai Pelawan dari tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 1**  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Pantai Pelawan

o	Tahun	Total
	2021	69.765
	2022	64.472
	2023	55.006

Sumber: BUMDES Desa Pangke Barat

Fenomena yang ketiga yakni masih rendahnya sadar wisata bagi masyarakat setempat (Zulaika & Trisakti, 2022). Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan akan mendorong perkembangan pariwisata menjadi lebih baik karena masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan sekitar pantai agar pariwisata dapat terus berkembang.

Berdasarkan pada fenomena di atas, tentunya diperlukan suatu tata kelola organisasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan objek wisata, yakni pengembangan objek wisata berbasis *agile governance* yang mampu mengakomodir kebutuhan pemerintah untuk menjadi lebih gesit dan responsif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Pengembangan Objek Wisata Pantai Pelawan Berbasis *Agile Governance* di Kabupaten Karimun Tahun 2023”.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengembangan objek wisata pantai Pelawan berbasis *agile*

*governance* di Kabupaten Karimun tahun 2023?

## C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pengembangan objek wisata pantai Pelawan berbasis *agile governance* di Kabupaten Karimun tahun 2023.

## D. Tinjauan Teori

### 1.) *Agile Governance*

*Agile governance* atau pemerintahan yang cepat, tangkas serta cerdas merupakan kegesitan birokrasi yang berfokus pada sarat kecepatan dan kemudahan, unik dan mampu berpikir *out of the box* untuk merespons dan mengkoordinasikan seluruh bagian organisasi (Winata et al., 2023). *Agile governance* adalah kemampuan sebuah instansi pemerintah dalam menanggapi atau merespons secara sigap dan cepat kondisi lingkungan yang dinamis dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan berubah (Wardani et al., 2024). Menurut Luna, Krutchen dan Moura dalam (Busri et al., 2023), *agile governance* adalah kemampuan masyarakat untuk merasakan, beradaptasi dan merespons dengan cepat dan berkelanjutan terhadap perubahan di lingkungannya, dan terjadi secara terkoordinasi dari kemampuan gesit (*agile*) dengan kemampuan tata kelola (*governance*) untuk memberikan nilai yang lebih baik. *Agile governance* merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memudahkan pemerintah agar lebih gesit dalam menghadapi tantangan dari perubahan lingkungannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Halim et al., 2021).

Luna, Krutchen dan Moura dalam (Halim et al., 2021) mengemukakan enam prinsip *agile governance* diantaranya: *good enough governance, business-driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach*, dan *simple design and continuous refinement*.

1. *Good enough governance* (Tata kelola pemerintah yang cukup baik), latar dari organisasi perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan tingkat tata kelola
2. *Business-driven* (Berlandaskan pada bisnis), bisnis harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan
3. *Human focused* (Fokus pada manusia), perlu adanya ruang untuk partisipasi masyarakat dan pendapat harus dihargai.
4. *Based on quick wins* (Berdasarkan keberhasilan secara cepat), keberhasilan yang diraih dengan cepat harus dijadikan motivasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.
5. *Systematic and adaptive approach* (Pendekatan yang sistematis dan adaptif), pada perubahan yang cepat dan sistematis dibutuhkan suatu kelompok yang dapat meningkatkan kemampuannya, yakni kemampuan intrinsiknya.
6. *Simple design and continuous refinement* (Desain yang sederhana dan berkelanjutan), dalam suatu kelompok harus mampu membuat desain yang sederhana serta memberikan hasil yang cepat dan mengalami peningkatan.

## 2.) Pengembangan Objek

## Wisata

Menurut Suwardjoko dalam (Jayanti, 2019), pengembangan objek wisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung demi kelangsungan pengembangan pariwisata. Terdapat beberapa jenis pengembangan pariwisata, diantaranya yaitu:

(1) Keseluruhan dengan tujuan baru, seperti membangun atraksi di situs yang tadinya digunakan sebagai atraksi;

(2) Tujuan baru, seperti membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi;

(3) Pengembangan baru secara keseluruhan, yakni keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas dengan meraih pasar yang baru;

(4) Pengembangan baru pada atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

(5) Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut

memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Menurut Pitana dalam (Widiantara & Anggreni, 2017), terdapat 7 fase dalam pengembangan pariwisata atau siklus pariwisata (*destination are life cycle*) diantaranya:

1. *Exploration* (Eksplorasi/penemuan).
2. *Involvement* (Keterlibatan).
3. *Development* (Pembangunan).
4. *Consolidation* (Konsolidasi).
5. *Stagnation* (Kestabilan).
6. *Dicline* (Penurunan).
7. *Rejuvenation* (Peremajaan).

Menurut Yoeti dalam (Jayanti, 2019) terdapat tiga faktor yang menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai industri. Ketiga faktor tersebut diantaranya: (1) tersedianya objek wisata dan atraksi wisata, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu daerah wisata. Contohnya keindahan alam, hasil kebudayaan, festival tradisional, dan lain-lain. (2) adanya *accessibility*, yaitu prasarana dan sarana dengan segala fasilitas sehingga memungkinkan para wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tersebut; dan (3) tersedianya *amenities*, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan selama dalam perjalanan wisata baik di dalam maupun di luar negeri.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki kondisi atau

karakteristik dari sekelompok manusia, objek dan fenomena yang sedang terjadi (Fiantika, 2020). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi dengan jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian dan bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam, serta menggambarkan karakteristik, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian (Fiantika, 2020).

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis ingin menggambarkan dengan menganalisis secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang sistematis, faktual tentang sejauh mana pengembangan objek wisata pantai Pelawan berbasis *agile governance* di Kabupaten Karimun tahun 2023.

#### **F. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Good Enough Governance**

Prinsip *good enough governance* (tata kelola pemerintah yang cukup baik) menitikberatkan pada tata kelola yang cukup baik pada sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah. Indikator

utama dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang cukup baik adalah pemerintah mampu responsif dan adaptif terhadap perubahan, mementingkan kualitas pelayanan yang efisien dan efektif, serta menyukseskan suatu kebijakan melalui pendorongan partisipasi masyarakat (Muttaqin & Permatasari, 2023).

Dalam perspektif *agile governance*, adanya tata kelola yang cukup baik (*good enough governance*) menjadi perhatian utama bagi setiap lembaga untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara adaptif dan responsif. Tata kelola yang cukup baik menjadi landasan utama diterapkannya *good governance* secara menyeluruh, yang memungkinkan pemerintah dapat mencapai tujuan dengan tingkat penerimaan minimal (Winata et al., 2023).

Pada konteks pengembangan objek wisata pantai Pelawan, instansi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun yang melaksanakan kewenangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pada objek wisata pantai Pelawan.

Selain itu, status sebagian lahan yang berada di pantai Pelawan, merupakan tanah milik pemerintah Kabupaten Karimun, yakni seluas 51.442 m<sup>2</sup>. Tanah milik pemerintah Kabupaten

Karimun tersebut menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun untuk melakukan pengembangan objek wisata pantai Pelawan di lahan tersebut.

Pengembangan pantai Pelawan dengan lahan yang cukup luas menjadi tantangan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan petugas untuk menjaga kebersihan serta memelihara fasilitas yang berada di pantai Pelawan. Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah melakukan sub kegiatan pengadaan, yakni pengadaan petugas penjaga dan pemelihara objek wisata pantai Pelawan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun melalui bidang Destinasi Pariwisata. Tugas dan fungsi dari petugas penjaga dan pemelihara objek wisata pantai Pelawan adalah bertanggung jawab atas penjagaan, kebersihan dan pemeliharaan, serta memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan di pantai Pelawan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga memberikan izin kepada siapapun yang bersurat ke Dinas Pariwisata untuk meminjam lahan dan panggung kesenian di pantai Pelawan untuk kegiatan acara, *gathering*, dan lain-lain. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa *stakeholder* terkait seperti BUMDes, kelompok sadar wisata

(pokdarwis) dan lain-lain agar bisa berkolaborasi bersama dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan.

## **2. Business-Driven**

Dalam kerangka konseptual *agile governance*, diperlukan aspek pengambilan keputusan atau kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan bisnis (*business driven*). Menurut Cooke dalam (Winata et al., 2023), prinsip *business driven* didasarkan pada *business value* yang direalisasikan secara berkelanjutan, pemberian kepercayaan kepada setiap pelaksana tugas untuk merealisasikan proses bisnis tersebut, serta meningkatkan komunikasi antara anggota tim dengan lingkungan pelaksanaan program organisasi.

Sebagai objek wisata favorit di Kabupaten Karimun, pantai Pelawan memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga dalam pengelolaannya melibatkan beberapa *stakeholder*. Setiap upaya yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder* memiliki orientasi yang kuat pada sektor bisnis dan pengembangan ekonomi. Salah satunya adalah untuk menarik kunjungan wisatawan ke pantai Pelawan.

Pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah mengadakan kerja sama dengan beberapa *stakeholder*, salah satunya adalah dengan pihak swasta. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah melakukan kerja sama secara tertulis maupun tidak tertulis

dengan beberapa pihak swasta dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan. Selama tahun 2023, Dinas Pariwisata mengadakan kerja sama dengan beberapa pihak swasta yakni kerja sama dengan PT. Riaualam Anugrah Indonesia, PT. Saipem Indonesia Karimun Yard serta Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Karimun (BP Kawasan Karimun).

Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun pernah bersurat kepada PT. Riaualam Anugrah Indonesia dan bekerja sama dalam pengadaan tong sampah di Pantai Pelawan sebagai upaya dalam menjaga kebersihan di pantai Pelawan serta memudahkan wisatawan membuang sampah pada tempatnya.

Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga berkolaborasi dengan PT. Saipem Indonesia Karimun Yard dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan, berupa pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di bidang lingkungan, yakni kegiatan *go clean* membersihkan pantai Pelawan bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan masyarakat lokal. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga berhasil mendapatkan bantuan dari PT. Saipem Indonesia Karimun Yard berupa pembuatan tempat parkir kecil untuk sepeda motor (*mini parking*) di pantai Pelawan yang

berasal dari dana-dana hibah atau bantuan dari pihak swasta. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi nyata oleh PT. Saipem Indonesia Karimun Yard dengan mendukung pembangunan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan pariwisata daerah dan menarik lebih banyak pengunjung ke pantai Pelawan.

Pada tahun 2023 juga terjadi kerja sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun (BP Kawasan Karimun) dan menghasilkan kesepakatan bersama yakni melakukan pembangunan jalan masuk menuju ke area parkir di pantai Pelawan. Pembangunan jalan tersebut mempermudah akses transportasi para wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai Pelawan.

### **3. *Human Focused***

Luna, Krutchen dan Moura dalam (Halim et al., 2021) menjelaskan bahwa prinsip *human focused* memiliki arti tersedianya ruang yang bebas bagi masyarakat untuk turut andil dalam sistem tata kelola yang tengah dilaksanakan oleh *stakeholder* tertentu, terutama pemerintah. Prinsip *human focused* tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih efektif, relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Asrida et al., 2024).

Dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis), yakni pokdarwis Pelawan Bestari sebagai

mitra pemerintah dalam mengembangkan objek wisata pantai Pelawan yang berperan dalam mendampingi masyarakat untuk menjaga, melestarikan lingkungan wisata dan memanfaatkan potensi lokal di pantai Pelawan.

Pada prinsip *human focused* dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan, terdapat suatu permasalahan, yakni masih rendahnya sadar wisata oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun melalui bidang Destinasi Pariwisata mengadakan kegiatan Gerakan Sadar Wisata pada objek wisata pantai Pelawan sebagai upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam menumbuhkan sadar wisata pada masyarakat, terutama masyarakat lokal terhadap pengembangan objek wisata pantai Pelawan.

**Gambar 2. Kegiatan Gerakan Sadar Wisata di Pantai Pelawan tahun 2023**



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun

Gerakan Sadar Wisata pada objek wisata pantai Pelawan ini berkonsep pada kegiatan aksi sadar wisata berupa gotong royong membersihkan pantai hingga pembekalan materi tentang

Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Pantai Pelawan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga memberi kesempatan kepada masyarakat hingga wisatawan di pantai Pelawan agar berpartisipasi dalam memberikan kritik, aduan dan saran terhadap pengembangan objek wisata pantai Pelawan. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun menyediakan pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).

Selain melalui pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), aduan dan laporan dari masyarakat terkait pengembangan objek wisata pantai Pelawan bisa disampaikan kepada petugas penjaga dan pemelihara pantai Pelawan. Setelah menerima penyampaian aduan dan laporan masyarakat dari petugas penjaga dan pemelihara pantai Pelawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun akan melakukan tindak lanjut terhadap penyampaian laporan tersebut, seperti kunjungan langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan para petugas, masyarakat, dan wisatawan di sekitar pantai Pelawan.

#### **4. Based On Quick Wins**

Menurut Luna, Krutchen dan Moura dalam (Halim et al., 2021) prinsip *based on quick wins* (berdasarkan keberhasilan secara cepat) merupakan suatu kemampuan menghasilkan solusi cepat untuk mendorong keberhasilan guna meningkatkan motivasi dan moral setiap pihak yang terlibat. Prinsip *based on quick wins* sangat penting dalam konteks pemerintahan dan

organisasi karena dapat menciptakan dorongan yang positif yang mendorong perubahan yang lebih lanjut dan menginspirasi partisipasi yang lebih luas dari semua pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, *based on quick wins* dapat menjadi pendorong yang efektif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan, masih terdapat permasalahan yakni minimnya layanan informasi mengenai objek wisata pantai Pelawan yang akan mempengaruhi minat kunjungan wisatawan dan berdampak pada citra wisata pantai Pelawan di pasar domestik maupun internasional. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk mempublikasikan tentang objek wisata favorit daerah Kabupaten Karimun tersebut.

Pada tahun 2023, langkah konkrit yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam memberikan layanan informasi mengenai pantai Pelawan adalah melakukan pengadaan pembuatan dan pemasangan papan informasi, papan himbuan, papan penunjuk arah dan lain-lain di area pantai Pelawan. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga melakukan pembuatan plang nama pada setiap fasilitas-fasilitas di pantai Pelawan.

Pemberian layanan informasi kepada wisatawan juga dilakukan oleh petugas penjaga dan pemelihara pantai Pelawan. Selain memberikan layanan informasi, petugas juga memberikan

himbauan kepada wisatawan melalui media pengeras suara agar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di pantai Pelawan.

**Gambar 3. Plang Nama Fasilitas di Pantai Pelawan**



Sumber: Data Olahan Penulis

Dalam hal keamanan dan keselamatan wisatawan, petugas penjaga dan pemelihara pantai Pelawan akan terus berkoordinasi dengan pihak keamanan (kepolisian) dan membuka selalu layanan informasi kepada wisatawan.

### **5. Systematic and Adaptive Approach**

Prinsip *systematic and adaptive approach* (pendekatan yang sistematis dan adaptif) menekankan pentingnya perubahan yang cepat dan terencana dalam organisasi, serta memerlukan tim yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapabilitas mereka, terutama dalam hal kemampuan intrinsik. Luna, Krutchen dan Moura dalam (Halim et al., 2021) menyatakan bahwa pada prinsip *systematic and adaptive approach*, suatu organisasi harus mampu

beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan arah atau tujuannya terhadap situasi atau kondisi yang sedang dialami. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, prinsip *systematic and adaptive approach* memungkinkan respon yang lebih efektif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Adanya perubahan teknologi dari penggantian sistem manual ke sistem digitalisasi, menyebabkan pelayanan publik menjadi lebih simpel sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. Pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan, untuk pembayaran tiket masuk ke pantai Pelawan masih dilakukan secara manual. Dengan adanya perubahan teknologi dari sistem manual ke sistem digital, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun berupaya untuk menerapkan suatu inovasi baru, yakni penggunaan *e-money* (pembayaran secara elektronik) pada tiket masuk ke pantai Pelawan.

Ide penerapan inovasi *e-money* merupakan upaya adaptif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun terhadap kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Namun pemberlakuan inovasi sistem *e-money* pada pembayaran tiket masuk ke pantai Pelawan belum bisa diterapkan, dikarenakan kurangnya persiapan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun

menerapkan penggunaan *e-money* tersebut.

### **6. Simple Design and Continuous Refinement**

Prinsip *simple design and continuous refinement* (desain yang sederhana dan berkelanjutan) menekankan pentingnya menciptakan desain yang sederhana dan efisien dalam setiap proyek atau kebijakan, sambil memastikan bahwa tim secara terus menerus meningkatkan keterampilan desain dan proses mereka. Luna, Krutchen dan Moura dalam (Halim et al., 2021), prinsip *simple design and continuous refinement* merupakan suatu kemampuan tim dalam mendesain solusi secara sederhana, berkelanjutan, dan mampu memberikan capaian yang cepat dan meningkat. Dengan membangun desain yang sederhana dan meningkatkan keterampilan secara terus-menerus, organisasi dapat memastikan bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi tantangan baru dan meraih keberhasilan secara berkelanjutan.

Salah satu langkah penting dalam mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah melibatkan masyarakat lokal dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan, yakni dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya pengembangan pada objek wisata. Dalam hal ini, pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah melakukan kegiatan bimbingan teknis mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daya tarik wisata, salah

satunya pada daya tarik wisata pantai Pelawan pada tahun 2023.

### **Gambar 4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pantai Pelawan**



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun

Penggunaan teknologi yang inovatif dalam pengelolaan sumber daya dan informasi juga meningkatkan keberlanjutan pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah menyediakan platform online seperti *website* dan media sosial dalam pengembangan pariwisata, termasuk pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan.

Platform *website* maupun media sosial milik Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun tersebut memberikan layanan informasi tentang program maupun *event* yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun serta menampilkan informasi dan mempromosikan destinasi objek wisata di Kabupaten Karimun. Media sosial tersebut juga digunakan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun sebagai wadah informasi dalam pengembangan objek wisata, salah satunya

pengembangan objek wisata pantai Pelawan.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengembangan objek wisata Pantai Pelawan berbasis *agile governance* tahun 2023, belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan penerapan pada prinsip *agile governance* yang belum maksimal seperti kurangnya inovasi baru dan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan sehingga mempengaruhi pada jumlah kunjungan wisatawan di pantai Pelawan. Tentunya, koordinasi dan fleksibilitas kebijakan perlu ditingkatkan agar pengembangan objek wisata pantai Pelawan dapat lebih efektif dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Selain itu, terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat pengembangan objek wisata pantai Pelawan yakni terbatasnya anggaran untuk pengembangan objek wisata pantai Pelawan sehingga sub kegiatan seperti pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata di pantai Pelawan menjadi tertunda. Selain itu, faktor lainnya seperti rendahnya sadar wisata oleh masyarakat lokal juga menjadi kendala bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam menerapkan prinsip *agile governance* dalam mengembangkan pengembangan objek wisata pantai Pelawan.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan objek wisata pantai Pelawan adalah:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun: Diharapkan agar meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat lokal, pedagang dan pihak swasta agar menciptakan sinergi pada pengembangan objek wisata pantai Pelawan. Meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal tentang pentingnya sadar wisata agar masyarakat ikut aktif dalam pengembangan objek wisata pantai Pelawan. Perbaikan dan penambahan layanan informasi seperti *website* dan lain-lain perlu dilakukan sehingga layanan informasi mengenai pengembangan wisata pantai Pelawan mudah diakses dan diperoleh oleh masyarakat luas.

2. Pokdarwis Pelawan Bestari: Diharapkan agar selalu mengajak masyarakat lokal untuk senantiasa menjaga kebersihan disekitar kawasan pantai pelawan dan mengadakan program kerja bakti seperti gotong royong.

3. Masyarakat: Ikut serta pada kegiatan pengembangan pantai Pelawan serta menjaga kebersihan dan keasrian pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan di pantai Pelawan serta tidak merusak fasilitas atau wahana yang berada di pantai Pelawan.

## H. Daftar Pustaka

Alvira Syahwa, D., Salsabella Inayah, K., & Nurpaliza. (2022). Potensi Objek Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Karimun Provinsi

- Kepulauan Riau the Potential of Tourism Objects on the Community Economy of Karimun Regency, Riau Islands Province). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(2), 27–37.
- Andrian, W. (2022). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Patisoni Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi*. 19(5), 1–23.
- Asrida, W., Rafi, M., Pane, R. P., Wazni., Yusri, Ali., & Wicaksono, B. (2024). *Agile Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Secara Berkelanjutan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Busri, Ihyani Malik, & Nur Wahid. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119.
- Fiantika, F. R. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Iskandar, H. (2021). Strategi Pengembangan Objek Wisata Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus: Pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun. *Kepariwisataaan: Jurnal Ilmiah*, 15(01), 29–44.
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 141–146. <https://doi.org/10.31311/par.v6i2.5691>
- Muttaqin, M. I., & Permatasari, A. (2023). Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 187–201.
- Suarto, E. (2017). *Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis Swot*. 19–24.
- Wardani, A. D. K., Yudharta, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Agile Governance dalam Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Pajak Daerah (E-Palapa) pada Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(2), 1–16.
- Widiantara, I., & Anggreni, Y. (2017). Strategi Pengembangan Taman Narmada Sebagai Salah Satu Daya Tarik Wisata Spiritual Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 12(1), 8–19.
- Winata, T. P., Wulan, D. O., & Farhaturrahmah, T. A. (2023). Kebijakan Pariwisata

Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 90–105.

Zulaika, M. (2022). *Peran Humas Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pelawan Pangke Barat*.

Zulaika, M., & Trisakti, F. A. (2022). Community Based Ecotourism: Partisipasi Pokdarwis Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pelawan Kabupaten Karimun. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(5), 295.